

BAB I

PENDAHULUAN

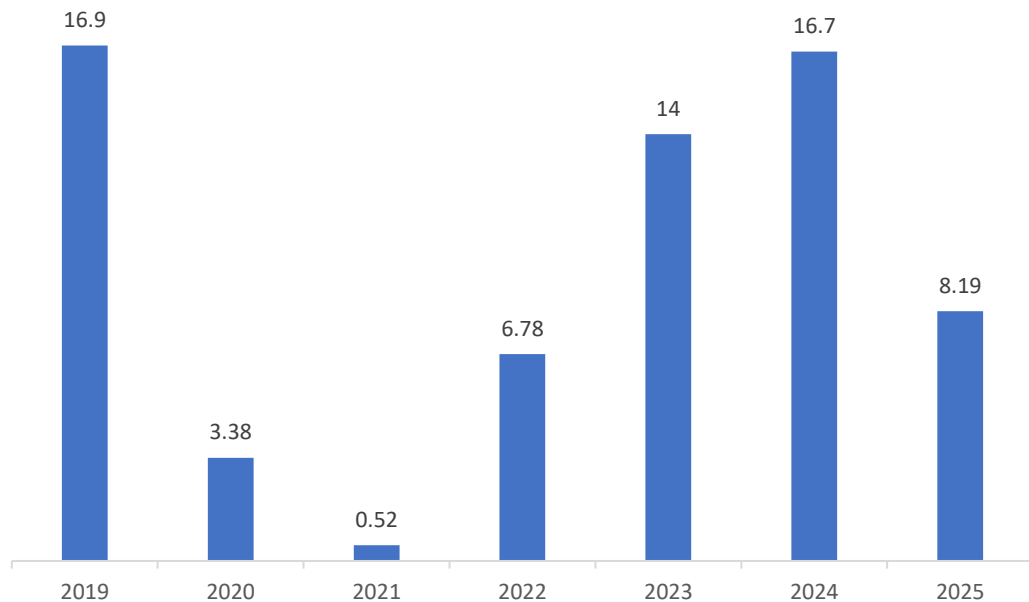
1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah sektor yang penting dalam membantu percepatan kemajuan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata dipahami sebagai sistem kegiatan wisata yang didukung oleh kerja sama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku bisnis, serta pemerintah pusat dan daerah. Wisata diartikan sebagai perjalanan sementara individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau menjelajahi keunikan tempat wisata (Ningsih et al., 2023). Dengan demikian, pariwisata lebih dari sekadar aktivitas rekreasional tetapi juga sektor yang memiliki banyak dimensi yang menghubungkan kontribusi sosial, pelestarian budaya, dan keberlangsungan ekonomi.

Secara keseluruhan, sektor pariwisata Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang baik setelah pandemi. Mengacu pada *Indonesia Tourism Outlook 2025/2026*, pendapatan devisa dari sektor ini mengalami peningkatan secara bertahap seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung. Pemulihan ekonomi ini menunjukkan bahwa pariwisata sedang bertransformasi kembali menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi nasional, yang membutuhkan pengelolaan yang lebih adaptif dan kolaboratif di masa depan (Kementerian Pariwisata et.al, 2025).

Hal tersebut dibuktikan dalam data statistik perkembangan devisa pada sektor pariwisata tahun 2019 hingga 2025 berikut ini.

Perkembangan Devisa Sektor Pariwisata 2019-2025 (Miliar Dolar AS)



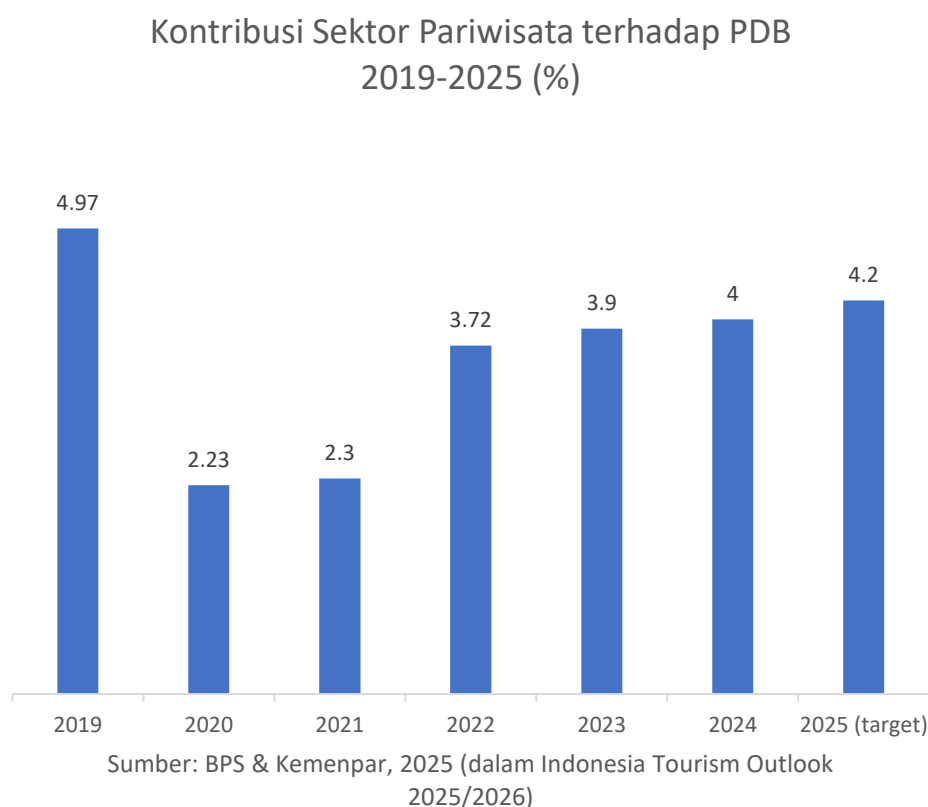
Sumber: BPS & Kemenpar, 2025 (dalam Indonesia Tourism Outlook 2025/2026)

Gambar 1. 1 Perkembangan Devisa Sektor Pariwisata 2019-2025

Sumber: BPS & Kemenpar, 2025

Pemulihan industri pariwisata di Indonesia terlihat secara angka melalui peningkatan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara yang mengindikasikan ketahanan yang kuat setelah penurunan akibat pandemi. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ini mengalami penurunan drastis dari 4,97% pada tahun 2019 kemudian menjadi 2,23% pada tahun 2020 serta telah menunjukkan tren pemulihan yang konsisten hingga mencapai angka 4,0% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata telah kembali menjadi elemen kunci sebagai motor penggerak pertumbuhan yang berkontribusi signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor

pariwisata kembali memiliki daya ungkit yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut ini data statistik kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2019-2025.



Gambar 1. 2 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB 2019-2025

Sumber: BPS & Kemenpar, 2025

Melalui optimisme pertumbuhan sektor pariwisata, Indonesia mulai mengubah cara pandang dalam pengembangan pariwisata dengan menempatkan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu pedoman utama kebijakan. Hal ini disertai dengan transformasi sumber daya manusia yang semakin fokus pada prinsip keberlanjutan melalui pengembangan pekerjaan ramah lingkungan yang mendukung perlindungan alam dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini mencakup kegiatan konservasi alam, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan

limbah, penerapan prinsip berkelanjutan di sektor akomodasi dan transportasi, serta perencanaan tujuan wisata yang berbasis ekologi dan budaya setempat. Berikut adalah gambar 1.1 perkembangan keterampilan di sektor pariwisata dari waktu ke waktu.



Gambar 1. 3 Perkembangan Keterampilan di Sektor Pariwisata
Waktu ke Waktu

Sumber: Indonesia Tourism Outlook 2025/2026

Pada tingkat provinsi, data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa volume pengunjung wisata mencapai angka yang signifikan yaitu 11,6 juta perjalanan di tahun 2024. Dalam konteks ini, Kota Banjarbaru menempatkan dirinya sebagai lokasi strategis pariwisata di Kalimantan Selatan dengan pencapaian 1,79 juta kunjungan menduduki posisi ketiga setelah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Kampung Wisata yang mengidentifikasi tujuh tujuan sebagai Pariwisata Khusus. Salah satu area yang menjadi fokus utama adalah daerah wisata yang memiliki karakter budaya penambangan intan di Kawasan Pumpung, Kecamatan Cempaka.

Secara konseptual, keberadaan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka sejalan dengan penjelasan mengenai kampung wisata menurut Joshi, yang menganggapnya sebagai cerminan pengalaman nyata dari kehidupan pedesaan, meliputi aspek keindahan alam, tradisi, serta ciri khas lokal yang menarik bagi turis (Antara & Afrida dalam Ningsih et al., 2023). Ciri-ciri ini semakin dikuatkan dengan pengakuan kawasan tersebut sebagai situs resmi Geopark Meratus karena menghubungkan warisan geologi dengan aktivitas penambangan tradisional yang telah menjadi identitas budaya masyarakat setempat (Media Geopark Meratus, 2023).

Kegiatan menambang intan merupakan pondasi kehidupan yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banjar. Sampai saat ini, praktik ini masih bertahan dan telah beradaptasi menjadi salah satu tujuan wisata utama di Kalimantan Selatan (Sari, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa penambangan intan tidak hanya menggambarkan nilai ekonomi, namun juga mengandung makna sejarah dan filosofi yang mendalam bagi komunitas setempat. Keistimewaan lokasi ini terletak pada keberlanjutan penggunaan metode tradisional meskipun ada modernisasi, dipadukan dengan pemandangan alam yang khas, sehingga menciptakan peluang wisata yang kompetitif dan membutuhkan rencana pengembangan yang menyeluruh (Jumriani et.al., 2023).

Guna menciptakan pariwisata berkualitas, *Indonesia Tourism Outlook 2025/2026* menekankan bahwa keberhasilan pembangunan destinasi sangat tergantung pada efektivitas koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam

penyelarasan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup pembaruan regulasi, pemberian insentif kepada pelaku usaha yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh rantai nilai pariwisata, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola dan transparansi informasi (Kementerian Pariwisata, et.al., 2025).

Visi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa fokus utama dalam pengembangan desa wisata adalah rekonstruksi ekonomi dan budaya yang berkelanjutan sehingga pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka tidak hanya merupakan usaha untuk membentuk suatu wadah pariwisata, tetapi juga merupakan proyek strategis untuk melestarikan warisan budaya Banjar melalui pengelolaan kolaboratif yang inklusif.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan kerja sama atau *collaborative governance* yang efektif antar pihak terkait (Maulia & Setiyono, 2023). *Collaborative governance* merupakan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan isu publik dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki perspektif berbeda, sehingga permasalahan dapat dianalisis dan diselesaikan secara lebih efektif (Noor, et.al., 2022). Sementara itu, Bryson dan Crosby (2015) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah proses pembuatan kebijakan publik yang didasarkan pada kesepakatan bersama (dalam Noor et. al., 2022). Dengan demikian, *collaborative governance* tidak hanya dipahami sebagai kerangka teori yang menekankan partisipasi dan kemampuan bekerja sama, tetapi juga sebagai model praktis yang memberikan arahan dalam penerapan kerja sama

di lingkungan nyata agar proses pengelolaan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka menunjukkan fenomena yang bertolak belakang dengan temuan studi sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2024) dan Seviai serta Zulkarnaini (2025) menemukan bahwa gagalnya kolaborasi pemerintahan bersama di lokus penelitian mereka disebabkan karena tidak adanya forum diskusi secara rutin serta komunikasi yang hanya terjadi secara singkat dan tidak terencana. Sebaliknya, di Pumpung menunjukkan bahwa mekanisme pertemuan tatap muka antar pihak sudah berjalan secara rutin. Namun, eksistensi dialog tersebut belum berbanding lurus dengan kemajuan infrastruktur, kemandirian finansial pengelola, maupun penyelesaian legalitas lahan milik masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi dialog dalam model Ansell dan Gash terpenuhi, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin efektivitas kolaborasi jika ada hambatan struktural dan kebijakan yang bersifat top-down (Fathahillah dan Cadith, 2022). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk memahami mengapa komunikasi yang sudah terstruktur di Pumpung Cempaka belum bisa menciptakan komitmen yang kuat dan hasil sementara yang nyata. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai praktik *collaborative governance* serta pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama antar pihak yang terlibat di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah:

1. Bagaimana dinamika proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses kolaborasi antar pemangku kepentingan di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka ditinjau melalui aspek dialog tatap muka dan pembangunan kepercayaan antar aktor.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses kolaborasi antar pemangku kepentingan di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Guna memberikan kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata budaya berbasis masyarakat di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang mengkaji tata kelola kolaboratif di sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih praktis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pokdarwis Pumpung Trisakti dalam memperkuat kolaborasi antar-aktor pada pengelolaan wisata pendulangan intan Cempaka. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak swasta, dalam mengembangkan strategi kolaboratif untuk pengelolaan wisata budaya yang lebih berkelanjutan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan sebuah penelitian agar terdapat suatu perbandingan dan untuk membantu menemukan buah pikir berupa gagasan baru, maka penelitian terdahulu akan mendukung dan menunjang peneliti untuk menghasilkan posisi

penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut merupakan keluaran-keluaran penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan dengan berorientasi pada tata kelola kolaboratif pemerintahan.

Pada penelitian yang pertama, penelitian dilakukan oleh Fatahillah dan Cadith (2022) dengan judul penelitian *Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan Geopark Bayah Dome lebih dominan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan struktur jaringan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai kepala badan. Sedangkan stakeholders lainnya seperti sektor dunia usaha, kelompok pariwisata, dan media belum dilibatkan ditambah koordinasi dengan masyarakat belum terjalin secara optimal. Pada penelitian ini diharapkan bahwa pemerintah dapat melakukan pendekatan “bottom-up” dalam proses kolaborasi, mengadakan program edukasi yang berkaitan tentang Geopark Bayah Dome, dan tentunya menghimpun kerja sama dengan sektor-sektor lainnya yang disertai pendekatan persuasif dan terstruktur dengan masyarakat.

Persamaan penelitian oleh Fatahillah dan Cadith (2022) dengan judul penelitian *Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome* dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di objek wisata pendulangan intan di Desa Pumpung adalah permasalahan terkait kepemilikan lahan yang juga mengalami hambatan dalam pengembangan wisata Geopark karena lahan milik

pribadi. Kemudian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu objek yang dilakukan oleh Fatahillah dan Cadith (2022) adalah objek wisata di Kabupaten Lebak, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada objek yang berbeda di Kota Banjarbaru.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gian Anggraeni Andriyanto pada tahun 2024 dengan judul penelitian *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* di Desa Sitiwinangun belum berjalan secara optimal karena beberapa indikator utama dari model Ansell dan Gash belum sepenuhnya tercapai, seperti belum adanya aturan resmi (MoU) yang mengikat antar stakeholder, adanya transparansi yang kurang, serta ketidakseimbangan sumber daya manusia. Meskipun kolaborasi ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kunjungan wisatawan dan produksi gerabah, masih terdapat hambatan serius berupa ego sektoral di masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap visi pengembangan desa wisata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori utama yaitu model kolaborasi yang digagas oleh Ansell dan Gash, serta penerapan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah fenomena kolaborasi yang terjadi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama berfokus pada tata kelola kolaboratif dalam lingkup pengembangan sektor pariwisata. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan objek spesifik penelitian, di mana jurnal ini secara khusus meneliti pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun yang berbasis

pada budaya kerajinan gerabah dan kesenian lokal di Kabupaten Cirebon, sementara penelitian ini akan dilakukan di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni pada tahun 2025 dengan judul *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Rantau Langsat di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu* menunjukkan bahwa meskipun proses kolaborasi telah mengupayakan adanya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif. Temuan penelitian mengungkapkan adanya hambatan signifikan berupa ketiadaan forum koordinasi rutin, komunikasi yang masih bersifat ad hoc melalui media sosial, rendahnya partisipasi masyarakat lokal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan aksesibilitas infrastruktur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka terletak pada penggunaan landasan teori Ansell dan Gash (2008) sebagai model analisis utama serta penerapan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada lokus dan objek wisata yang dikaji. Penelitian tersebut berfokus pada pengembangan desa wisata berbasis wisata alam dan budaya Suku Talang Mamak di Riau, sedangkan penelitian ini mengeksplorasi tata kelola kolaboratif pada wisata pendulangan intan di Kota Banjarbaru yang memiliki karakteristik aktivitas tambang rakyat sebagai daya tarik utamanya.

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veronica Putri Sevia dan Zulkarnaini berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten*

Bengkalis yang dipublikasikan pada tahun 2025. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pangkalan Jambi belum berjalan efektif. Berdasarkan analisis teori Ansell dan Gash, ditemukan bahwa dialog tatap muka antar pemangku kepentingan masih belum terjadwal dengan baik dan jarang melibatkan seluruh aktor secara bersama-sama dalam satu forum. Meskipun terdapat upaya untuk membangun kepercayaan dan hasil sementara seperti penghargaan nasional, kolaborasi masih terhambat oleh ketidakseimbangan sumber daya manusia di tingkat lokal serta komitmen yang belum optimal dari semua pihak yang terlibat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini pada Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka terletak pada penggunaan landasan teori Ansell dan Gash sebagai model analisis utama yang meliputi elemen dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menerapkan metode pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika antar aktor di lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus objek dan lokus penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji ekowisata mangrove dengan pendekatan fenomenologi di Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian ini berfokus pada daya tarik wisata pendulangan intan di Pumpung.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Setyaningtyas, Maesaroh, & Widowati (2024) yang berjudul *Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Grobogan* dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa pada kondisi awal koordinasi lintas sektor

masih belum dilakukan secara komprehensif, didukung dengan ego sektoral dan kurangnya pemahaman tentang *collaborative governance*. Namun desain kelembagaan yang dilakukan selanjutnya dalam menetapkan prosedur dalam penerapan *collaborative governance* menghasilkan kebijakan yang berisi arahan yang jelas bagi kolaborasi multipihak melalui pendekatan inklusif mendapat respon positif dari seluruh pihak. Proses kolaborasi yang dilakukan didukung dengan pertemuan rutin, fasilitasi diskusi yang setara, dokumentasi yang transparan dan evaluasi secara berkala menumbuhkan kepercayaan antar aktor yang terlibat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningtyas, Maesaroh, & Widowati (2024) yang berjudul *Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Grobogan* dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan dalam menarik metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif akan memenuhi unsur-unsur yang diperlukan peneliti dalam mengeksplorasi temuan penelitian. Kemudian, perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek yang akan diteliti, yang mana pada penelitian ini dilakukan pada objek wisata di Kabupaten Grobogan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan secara khusus dilakukan pada objek wisata pendulangan intan di Desa Pumpung, Kota Banjarbaru.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 *Collaborative Governance*

Fokus *collaborative governance* berada di bidang kebijakan dan permasalahan yang mengenai masyarakat umum (Nasution, 2023). Konsep

pengelolaan bersama ini berkembang karena masalah publik tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah sendiri, tetapi perlu kerja sama dari berbagai sektor yang berbeda. Untuk memahami konsep ini, maka juga perlu mengetahui bahwa paradigma *governance* merupakan pergeseran cara mengelola pemerintahan dalam penyusunan kebijakan publik, yang tidak hanya berpusat pada pemerintah saja, tetapi melibatkan pihak-pihak lain seperti sektor swasta dan masyarakat sehingga terbentuk hubungan yang saling tergantung (Nasution, 2023). Paradigma ini mulai muncul sejak awal dekade 1990-an, dan istilah *governance* mendorong para ahli untuk tidak hanya memperhatikan pemerintah sebagai lembaga (institusi), tetapi juga memandang pemerintahan sebagai proses yang melibatkan pemerintah dan berbagai pihak di luar pemerintah (Karso, 2022).

Colebatch (2004) menjelaskan bahwa *governance* adalah upaya yang melibatkan para pihak dari luar pemerintahan seperti stakeholder yang memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan dan melaksanakan keputusan (dalam Rahardian, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga berbagai pihak di luar pemerintah dan negara sehingga pihak yang terlibat sangat luas (Karso, 2022). Menurut Henk Addink (2008), *governance* dapat berjalan baik jika pemerintah, rakyat, dan sektor swasta saling mendukung dan bekerja sama. Jika salah satu pihak tidak bekerja sama, maka proses penyelenggaraan akan gagal (dalam Karso, 2022). Berdasarkan pemahaman tersebut, *governance* dapat diartikan sebagai proses pengelolaan bersama antara pemerintah dan berbagai aktor lainnya untuk mewujudkan tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk perkembangan dari konsep tata kelola modern adalah *collaborative governance* yang mengutamakan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain sebagai pusat dari proses tata kelola. Kata "kolaborasi" mulai dipakai pada abad ke-19, ketika industri berkembang dan organisasi menjadi lebih rumit, serta tugas dan peran para anggotanya semakin terbagi dan kolaborasi dijelaskan sebagai cara melihat proses tata kelola melalui kacamata jaringan sosial (Habibah, 2021). Dalam model ini, semua pihak yang terlibat harus ikut serta dalam diskusi dan bisa menyampaikan kepentingannya masing-masing, serta menentukan manfaat yang diperoleh oleh setiap pihak. Kolaborasi juga didefinisikan oleh O'flynn dan Wanna sebagai kerja sama dengan orang lain, yang berarti seseorang atau kelompok melakukan upaya tertentu dengan syarat dan kondisi yang ditentukan (dalam Habibah, 2021). Menurut Alter dan Hage (1993), upaya kolaborasi muncul sebagai cara untuk mencapai tujuan secara lebih fleksibel, dengan hasil yang lebih kreatif dan cepat dibandingkan bila organisasi bekerja sendirian (dalam Islamy, 2018). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kolaborasi adalah proses kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk saling melengkapi sumber daya, keahlian, dan kepentingan, sehingga mencapai hasil yang lebih baik melalui interaksi yang partisipatif dan saling menguntungkan.

Adapun pengertian *collaborative governance* sudah dibahas oleh banyak ahli. Misalnya, pengertian yang paling umum digunakan oleh para peneliti adalah definisi yang diberikan oleh Ansell dan Gash (2008), menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah bentuk pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga pemerintah secara langsung melibatkan pihak-pihak non-pemerintah

dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, mendorong kesepahaman, serta melalui diskusi yang mendalam. Tujuannya adalah untuk menyusun atau melaksanakan kebijakan publik, atau mengelola program serta aset yang dimiliki oleh publik.

Agrawal dan Lemos (dalam Nasution, 2023) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah dan non-pemerintah, melainkan juga sektor swasta, masyarakat, dan kelompok sipil. Kolaborasi ini terbentuk karena adanya sinergi antar pihak dan perencanaan yang bersifat campuran seperti kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun Emerson dan Nabatchi (2012) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah proses dan struktur pengambilan keputusan serta pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat secara aktif, melewati batas-batas lembaga pemerintah, tingkatan pemerintahan, maupun ranah publik, swasta, dan sipil untuk mencapai tujuan bersama. Robertson dan Choi (dalam Nasution, 2023) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif yang demokratis, di mana setiap peserta memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginannya dalam proses tersebut.

Dari berbagai penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah suatu bentuk pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, secara bersama dan setara. Proses ini berjalan secara formal, melalui diskusi mendalam,

dan berorientasi pada kesepahaman untuk mencapai tujuan bersama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

1.6.2 Proses *Collaborative Governance*

Dalam penelitian tentang tata kelola kolaboratif, terdapat berbagai kerangka teoritis yang sering digunakan oleh para peneliti sebagai dasar analisis untuk memahami dinamika kolaborasi antara berbagai aktor. Salah satu contohnya adalah struktur yang diciptakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang memberikan pendekatan menyeluruh dengan jangkauan luas mulai dari konteks sistem makro hingga rezim tata kelola kolaboratif.

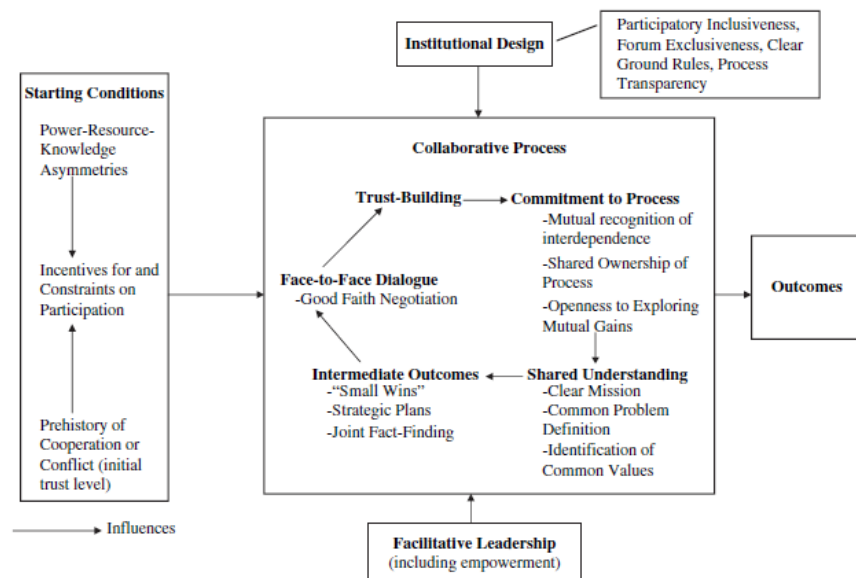
Meskipun teori *collaborative governance* yang diusulkan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) memberikan kerangka analisis yang lengkap dan sistematis mengenai dinamika kolaborasi, penelitian ini tidak mengikuti model tersebut sebagai pondasi analisis. Hal ini dikarenakan fokus dari penelitian ini lebih menekankan pada pemaparan tahapan proses kolaborasi dalam konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memilih model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2008) yang lebih tepat dan terstruktur dalam menjelaskan tahapan proses serta relevan dengan kondisi nyata di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka, khususnya karena adanya kedalaman pada dimensi interaksi inti yang menekankan aspek Dialog Tatap Muka dan Pembangunan Kepercayaan.

Hal tersebut dapat merepresentasikan analisis masalah di lokasi penelitian, di mana tantangan terbesar dalam kolaborasi tidak terletak pada kurangnya forum, melainkan pada mutu diskusi dan kepercayaan antar aktor yang masih terhambat

oleh isu-isu penting seperti legalitas tanah. Selain itu, model ini memandang kolaborasi sebagai sebuah proses siklus yang dinamis dan saling ketergantungan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana hambatan pada tahap awal dapat berdampak secara berkelanjutan terhadap proses-proses kolaborasi selanjutnya. Kemudian mengingat pengembangan objek wisata ini merupakan inisiatif formal dari lembaga pemerintah, kriteria Ansell dan Gash mengenai forum yang diinisiasi oleh lembaga publik sangat selaras dengan tipologi kolaborasi yang terjadi di lapangan dan peserta dalam forum ini mencakup berbagai aktor dari luar negara.

Guna menjelaskan dalam mengkonstruksi kolaborasi, Ansell dan Gash (2008) menetapkan model yang penting untuk digunakan dalam membangun *collaborative governance*. Empat komponen dalam model tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

Figure 1
A Model of Collaborative Governance



Gambar 1. 4 Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008)

Sumber: Ansell dan Gash (2008)

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Adapun tahap pertama model *collaborative governance* yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2008) adalah kondisi awal. Kondisi awal ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah proses kolaborasi akan berhasil atau gagal, dan berfungsi sebagai faktor pendukung atau penghalang dalam kerjasama antara aktor. Sebagai contoh, Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa satu aktor mungkin menganggap aktor lainnya sebagai lawan. Di sisi lain, aktor yang berbeda dapat melihat kolaborasi sebagai sebuah upaya yang saling menghormati. Situasi awal seperti itu akan berpengaruh pada ketidakseimbangan sumber daya yang tersedia selama proses kolaborasi.

Terdapat tiga variabel utama dalam kondisi awal tersebut, yaitu ketidakseimbangan pengaruh atau kekuatan, yang berarti setiap aktor memiliki tingkat pengaruh dan kekuatan yang berbeda yang harus diperhatikan sebagai faktor yang memengaruhi langkah awal kolaborasi, karena sumber daya yang dimiliki setiap aktor juga akan menentukan dominasi dalam kolaborasi; insentif yang ada untuk para pemangku kepentingan, karena aktor akan mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh dari kolaborasi dalam upaya untuk memaksimalkan manfaat, serta dukungan tambahan apabila tidak ada pilihan alternatif yang lebih baik selain kolaborasi; dan sejarah hubungan antar aktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan pandangan mereka dalam berkolaborasi, di mana semakin buruknya hubungan di masa lalu dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan untuk berkolaborasi.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Bagian ini berkaitan dengan cara aturan dasar dalam kolaborasi disusun dan diimplementasikan. Tahapan ini sangat krusial karena berfungsi sebagai landasan prosedural dalam keseluruhan proses kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan menjelaskan metode, struktur, dan mekanisme formal yang mengatur partisipasi para aktor dalam forum kolaboratif sehingga proses dapat berjalan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, desain kelembagaan menekankan pentingnya penetapan aturan yang jelas, bagaimana forum

kolaborasi dibentuk, serta sejauh mana pelaksanaan kolaborasi dilakukan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan.

Desain kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai alat yang mencegah dominasi oleh pihak tertentu, menjamin kesetaraan peran antara aktor, dan memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap hasil kolaborasi. Kelembagaan yang terbentuk secara inklusif menjadi pedoman bersama bagi para aktor dalam menjalankan kolaborasi, memastikan bahwa semua pihak memiliki peluang yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Desain kelembagaan dalam proses kolaboratif umumnya didasarkan pada tiga prinsip utama (Ansell dan Gash 2007 dalam Habibah):

- a. ***Participatory Inclusiveness***, yaitu partisipasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan cara yang setara, di mana setiap pihak memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai objek konsultasi.
- b. ***Forum Exclusiveness***, yaitu membentuk sebuah forum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat interaksi antara para pemangku kepentingan, dengan pengelompokan atau kategori diskusi yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing pihak.
- c. ***Clear Ground Rules and Process Transparency***, yaitu penerapan pedoman yang jelas dan konsisten dalam mendukung kolaborasi, disertai dengan keterbukaan di setiap langkah proses agar semua pihak yang terlibat

merasa yakin bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama, bukan penguasaan dari satu pihak.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Menurut Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan berperan krusial dalam menjaga serta menetapkan pedoman yang jelas, membangun kepercayaan, mendorong komunikasi, dan mencari keuntungan bersama. Saat insentif untuk terlibat kurang kuat, distribusi kekuasaan dan sumber daya tidak merata, dan tingkat konflik tinggi, intensitas peran kepemimpinan menjadi semakin vital. Tipe kepemimpinan yang diperlukan sangat tergantung pada situasi tertentu. Ketika ada tingkat ketidakpercayaan yang tinggi antara aktor, peran pemimpin sebagai perantara yang objektif menjadi lebih signifikan. Namun, dalam kondisi di mana insentif rendah atau kekuasaan tidak seimbang, pemimpin sering kali perlu campur tangan untuk mendorong partisipasi para pemangku kepentingan atau memberdayakan aktor yang kurang kuat.

Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang mampu mengakomodasi berbagai masukan dari aktor yang berbeda menjadi kunci dari kolaborasi, di mana dalam proses tersebut semua aktor dapat terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan permasalahan (Rahardian, 2024).

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi dalam variabel pendekatan yang diajukan oleh Ansell dan Gash (2008) adalah esensi dari model *collaborative governance* yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya, proses kerjasama akan

menemukan berbagai tantangan dinamis, di mana dalam konteks ini, Ansell dan Gash (2008) menyarankan agar pada proses kolaborasi, para pihak yang terlibat melakukan beberapa tindakan yang sebaiknya dilakukan yaitu:

1. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Kolaborasi dimulai dengan memulai percakapan langsung yang bertujuan untuk menciptakan interaksi antara berbagai pihak yang fokus pada mencapai kesepakatan bersama. Hubungan yang terjalin secara mendalam dari percakapan langsung ini akan membantu dalam menemukan potensi keuntungan bersama di antara aktor-aktor, serta mengenali tantangan dan kekurangan yang mungkin muncul saat bekerja sama.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Pemimpin yang efektif dalam kolaborasi adalah mereka yang memahami bahwa aktor yang terlibat perlu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang sebelumnya bertentangan sebelum melanjutkan untuk mengambil risiko dalam kerja sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk meluangkan waktu yang cukup sebelum memulai pendekatan kolaboratif, karena kepercayaan dibentuk melalui pemahaman atas sejarah konflik yang telah terjadi. Pada proses membangun kepercayaan, bukan hanya waktu yang diperlukan, tetapi juga adanya tingkat komitmen yang tinggi untuk mempertahankan hubungan yang seimbang.

3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to The Process*)

Komitmen dari semua pihak yang terlibat adalah faktor kunci yang menentukan apakah kolaborasi akan berhasil atau gagal. Keberanian untuk

menjalani proses kolaboratif memerlukan kesiapan untuk menerima hasil dari diskusi, meskipun hasil tersebut mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan masing-masing pemangku kepentingan. Komitmen dan proses itu sendiri sangat penting, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab bersama terhadap hasil yang telah disepakati dalam diskusi, sehingga untuk memperkuat komitmen para aktor, penting untuk menciptakan ketergantungan tinggi karena hal ini akan meningkatkan komitmen.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Istilah *shared understanding* yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2008) memiliki makna yang berbeda dari konsep *mutual understanding* yang ditekankan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh. *Mutual understanding* berfokus pada kesepahaman yang memungkinkan para aktor untuk saling memahami dan menghargai posisi serta kepentingan satu sama lain, meskipun mereka mungkin tidak setuju dalam beberapa hal. Di sisi lain, *shared understanding* menurut Ansell dan Gash (2008) merujuk pada kondisi di mana semua pihak yang terlibat memiliki persepsi yang sama mengenai tujuan dan solusi dari masalah yang telah disetujui bersama dalam rangka kerjasama.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Aspek ini merupakan komponen krusial dalam proses untuk menciptakan momentum yang dapat mendorong arah kolaborasi yang berhasil. Keberhasilan atau kegagalan dalam *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang terdapat dalam proses

tersebut. Keberhasilan membangun kolaborasi antara aktor dari sektor pemerintahan dan non-pemerintahan dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara aktor-aktor tersebut yang terlibat dalam proses. Kolaborasi akan lebih mudah dilakukan jika tujuannya jelas dan manfaatnya nyata, terutama ketika terdapat "keberhasilan kecil" yang bisa diraih di tahap awal. Keberhasilan kecil ini sangat vital karena dapat meningkatkan rasa percaya dan komitmen di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan siklus positif yang memperkuat kolaborasi.

Namun, ketika hubungan antar pihak sudah penuh dengan konflik yang tinggi dan mereka tidak dapat melihat adanya kemungkinan keberhasilan kecil, maka kolaborasi sebaiknya tidak dimulai terlebih dahulu. Selain itu, pada situasi yang memiliki tujuan sangat besar atau kompleks, membangun kepercayaan tidak selalu harus melalui keberhasilan kecil, tetapi bisa dengan melakukan eksplorasi bersama sejak awal mengenai nilai dan manfaat dari kolaborasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, tahapan proses kolaborasi yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008) beserta variabel-variabel pendukung yang penting akan dipakai oleh peneliti sebagai landasan dasar untuk menganalisis proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.6.3 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Proses *Collaborative Governance*

Seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008) bahwa dalam model *collaborative governance* yang telah diuraikan, pada tahapan-tahapan sebelum proses kolaborasi merupakan tahapan yang akan mempengaruhi proses kolaborasi.

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal berfungsi sebagai elemen yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghalangi kolaborasi, karena interaksi pertama antara para pihak dapat membentuk relasi yang memungkinkan mereka untuk bersama-sama membuat keputusan guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Kondisi awal mencakup kepentingan dari setiap pihak, sumber daya yang tersedia bagi masing-masing individu, serta pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang ingin berkolaborasi, disertai juga dengan latar belakang hubungan yang telah terjadi, baik itu kerja sama yang sudah dilakukan sebelumnya maupun perselisihan yang pernah muncul.

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan adalah komponen penting yang dapat mendorong proses kolaborasi agar lebih inklusif dan menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara tanpa adanya persaingan kekuasaan. Seorang pemimpin kolaboratif perlu memiliki kemampuan untuk mendukung semua pemangku kepentingan agar berperan aktif dalam

kolaborasi untuk mencapai kesepakatan dan memberdayakan semua pihak yang terlibat.

3. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Kehadiran lembaga yang terstruktur dalam menciptakan kerja sama merupakan elemen penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan kolaborasi, karena lembaga tidak hanya mencerminkan siapa yang terlibat dalam aktivitas tertentu, tetapi juga mencakup ketentuan dasar yang tegas, menjelaskan jenis forum dengan rinci, serta mengatur pelaksanaan dan keterbukaan di setiap fase proses kolaborasi.

Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses pelaksanaan kolaborasi akan menjadi nilai-nilai yang menjadi pedoman peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam pelaksanaan kolaborasi di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 *Collaborative Governance*

Collaborative governance merujuk pada proses kerja sama yang terstruktur antara pemerintah dengan masyarakat atau pihak non-pemerintah lainnya, di mana setiap aktor berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berbagi peran, serta mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan sektor pariwisata. *Collaborative governance* yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada proses kolaboratif yang berlangsung antara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kelompok Sadar Wisata Trisakti

Pumpung dalam upaya mengembangkan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.7.2 Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan objek wisata dipahami sebagai upaya perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas objek wisata yang dilakukan melalui kerja sama antar aktor. Pada pengembangan objek wisata dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada proses mekanisme tata kelola dan koordinasi yang terjalin antara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kelompok Sadar Wisata Trisakti Pumpung termasuk faktor pendorong dan penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.8 Operasionalisasi Konsep/Kerangka Berpikir

1.8.1 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan pada gagasan tentang *collaborative governance* yang secara berlandaskan kerja sama antara berbagai aktor, termasuk pemerintah sebagai pengatur kebijakan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang turut terlibat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ide-ide pokok dan analisis teori yang digunakan, peneliti akan menyajikan operasionalisasi konsep di tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi Konsep	Aspek yang Digali
Proses <i>Collaborative Governance</i> (Ansell dan Gash, 2008)	1. Dialog Tatap Muka	Adanya kegiatan dalam bentuk forum pertemuan atau musyawarah untuk antar aktor saling berkomunikasi secara tatap muka dengan tujuan untuk memutuskan suatu konsensus/keputusan dalam kolaborasi yang dilakukan.
	2. Membangun Kepercayaan	Adanya ketepatan janji yang dilakukan dan transparansi antar para aktor setelah diskusi hasil dari dialog tatap muka guna membangun kepercayaan.
	3. Komitmen terhadap Proses	Adanya tujuan yang sama yang telah disepakati antar para aktor dan peran aktif dari masing-masing aktor untuk terus terlibat dalam proses kolaborasi.
	4. Pemahaman Bersama	Adanya pemahaman terkait tujuan bersama yang akan diraih dalam proses kolaborasi dengan kesamaan pada visi, misi, dan mutu bersama dalam berkolaborasi.
	5. Hasil Sementara	Adanya keberhasilan sementara yang telah dicapai meskipun hasil tersebut dalam bentuk kecil serta adanya pembentukan rencana yang jelas terkait tujuan dan manfaat yang konkret dalam kolaborasi.
Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Proses <i>Collaborative</i> (Ansell dan Gash, 2008)	1. Kondisi Awal	Adanya pertemuan dalam menjalin hubungan antara para aktor untuk pengembangan objek wisata pendulangan intan di Desa Pumpung, adanya keinginan aktor untuk berkolaborasi, dan adanya visi dan tujuan bersama para aktor dalam pertemuan pertama kolaborasi.

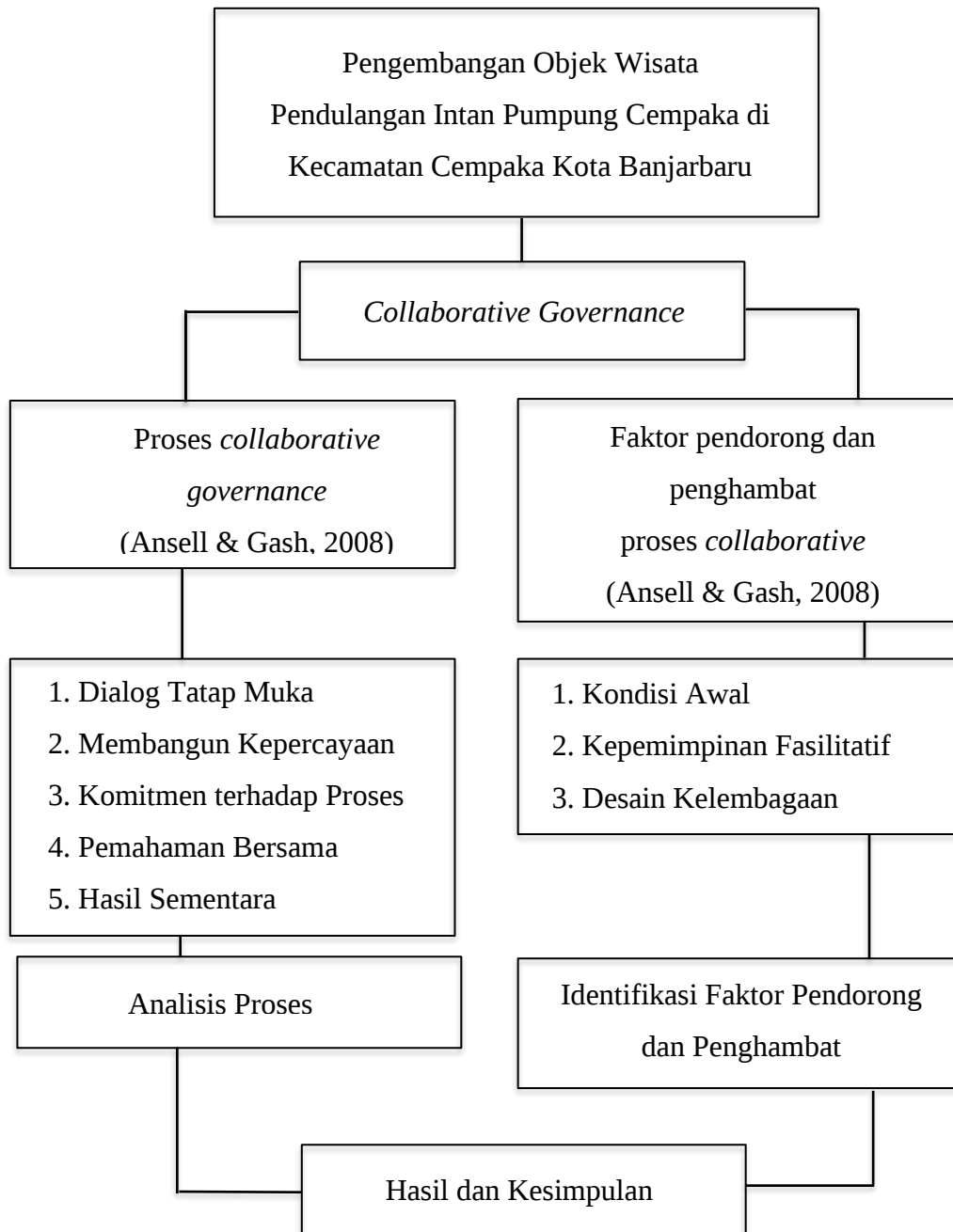
Konsep	Dimensi Konsep	Aspek yang Digali
	2. Kepemimpinan Fasilitatif	Adanya bimbingan dan pemberian fasilitas ruang dalam menunjukkan peran dan masukan kepada para aktor yang terlibat.
	3. Desain Kelembagaan	Adanya aturan dasar yang jelas dan proses pelaksanaan kolaborasi yang transparansi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Oleh karena itu, operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori-teori yang telah disusun oleh para ahli, yang diadaptasi dengan konteks penelitian dan relevan sebagai alat ukur untuk menilai kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan karena bertujuan agar analisis yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang disajikan memiliki nilai objektif. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan proses *collaborative governance* yang sedang berlangsung dalam pengembangan objek wisata pertambangan intan di Kawasan Pumpung, Kecamatan Cempaka. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata pertambangan intan dengan memperhatikan pelaksanaan yang telah dilakukan di objek wisata tersebut.

1.8.2 Kerangka Alur Pemikiran

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perumusan masalah dalam penelitian, peneliti menyajikan kerangka alur pemikiran di gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 5 Kerangka Alur Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Pada bagan tersebut dapat dilihat isu/permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengembangan objek wisata yang berada di Kawasan

Pumpung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Secara lebih spesifik, pengembangan objek wisata akan dibahas berdasarkan aspek *collaborative governance* yang memuat proses dan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut dengan melihat dimensi-dimensi konsep yang telah disampaikan dalam teori Ansell dan Gash (2008), sehingga peneliti dapat melakukan analisis dan identifikasi untuk menarik hasil dan kesimpulan dalam penelitian.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian berfokus pada data yang bukan berupa angka, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang bersifat naratif (Dukeshier & Thurlow, dalam Sugiyono 2022). Moleong (dalam Fiantika et al., 2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, cara pandang, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan deskriptif dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selaras dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengelolaan objek wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya agar dapat memberikan solusi nyata untuk masalah yang dihadapi dalam pengembangan wisata.

1.9.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Pada penelitian ini, lokasi peneliti dilakukan di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka di Kawasan Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Adapun situs penelitian dalam penelitian adalah lokasi yang dijadikan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

Pada penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata pendulangan intan, situs penelitiannya adalah Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka, Kelurahan Sungai Tiung, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, serta Badan Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang berfungsi sebagai informan atau narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Informan dipilih dengan metode *purposive sampling*, di mana pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan tujuan dan pemahaman mengenai fokus fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah orang-orang yang terlibat dalam proses *collaborative governance* untuk mengembangkan objek wisata pendulangan intan yaitu termasuk Lurah Sungai Tiung, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan,

Ketua dan anggota Pokdarwis Pumpung Trisakti, dan masyarakat sekitar sebagai aktor pendukung.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, karena menggunakan pendekatan kualitatif maka jenis data yang digunakan adalah teks atau narasi serta sekumpulan kata yang tidak terdiri dari angka. Data kualitatif umumnya berbentuk kalimat, hasil wawancara, dan juga studi lapangan (Fiantika et. al, 2022). Peneliti kemudian memproses data yang telah dikumpulkan itu agar dapat menggambarkan dan menjelaskan temuan yang ada.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai serta sumber data sekunder. Berikut penjelasannya.

1) Data Primer

Data primer merupakan data paling utama yang didapatkan peneliti secara langsung dari pengamatan dan wawancara dengan informan. Dalam konteks penelitian kualitatif ini, data primer meliputi semua informasi dalam wawancara yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang membantu menjelaskan data primer. Pada penelitian ini, data sekunder terdiri dari dokumen, jurnal, artikel, peraturan kebijakan dan berita yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, terdapat pula dokumentasi berupa foto yang berkaitan dengan kolaborasi dalam

pengembangan objek wisata pendulangan intan di Kawasan Pumpung, Kecamatan Cempaka.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi dan fakta. Melalui proses dalam memahami cara-cara untuk mengumpulkan data, peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

1) Wawancara

Adapun teknik selanjutnya adalah wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan cara melibatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin diketahui oleh peneliti. Menurut Nazir (1999), wawancara dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian melalui dialog langsung antara pewawancara dan responden, dengan bantuan alat yang disebut panduan wawancara (dalam Hardani et al., 2020). Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan individu-individu yang berpartisipasi dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

2) Dokumentasi

Hardani et al. (2022) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pengambilan informasi dari berbagai dokumen. Pada penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut berupa catatan,

foto, gambar, kebijakan, peraturan, arsip, laporan, serta artikel yang berkaitan dengan pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan (dalam Hardani et al., 2022) menjelaskan bahwa analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisir data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara teratur, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan hasilnya bisa disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah kegiatan (dalam Hardani et al. , 2022) yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Aktivitas yang dilakukan dalam reduksi data mencakup pemilihan, pengelompokan, dan penghilangan data yang dianggap tidak relevan selama pengumpulan data. Ini berlaku untuk data dari wawancara, dokumen, dokumentasi, peraturan, dan catatan penting yang telah dikumpulkan. Aktivitas ini dilakukan secara berkelanjutan sampai seluruh proses pengumpulan data selesai. Reduksi data juga berarti memudahkan data agar informasi yang diperoleh dapat memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkategorikan data sesuai dengan proses *collaborative governance* serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

2. Penyajian Data (*data display*)

Pada penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk narasi. Melalui cara ini, lebih mudah untuk mengerti situasi yang terjadi. Penyampaian data terdiri dari deskripsi singkat, diagram, dan hubungan antar kategori. Dengan demikian, dalam proses penelitian, penyajian data mendukung peneliti untuk membangun pemahaman dan merencanakan langkah selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian yang berhubungan dengan fokus yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan akan dianggap sah jika didukung oleh bukti yang kuat dan sesuai dengan data di lapangan. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan di awal, tetapi sifatnya sementara karena dapat berubah setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan akan berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.

1.9.8 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2013), kualitas data dari penelitian dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kualitas instrumen penelitian dan cara pengumpulan data. Kedua faktor ini saling terkait, karena kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut, yang berarti data yang diperoleh harus terukur dengan baik dan terpercaya. Hal ini bergantung pada cara pengumpulan data yang digunakan. Jika cara yang dipilih untuk mengumpulkan data tidak tepat,

maka kevalidan dan reliabilitas kualitas instrumen penelitian yang dihasilkan dapat terpengaruh. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka.